

Model Implementasi



Sri Yuliani
Fisip Uns

Kegagalan Implementasi : Bad Policy atau Bad Implementation

- Bad policy :
 - proses formulasi (politik) – symbolic policy atau kebijakan yang dibuat karena motivasi politik (UU MD3)
 - Kualitas formulasi (isi atau rumusan kebijakan)
- Bad Implementation/Implementation gap
 - tipe/tujuan /masalah kebijakan (*ill-structured*)
 - Model implementasi
 - Organisasi
 - Lingkungan /konteks kebijakan



Model Implementasi

- Command-control vs mekanisme pasar
- Top Down vs Bottom-Up
- Hibrid



Model mekanisme paksa (command-control)

- Lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa dan **tidak ada mekanisme insentif** bagi yang menjalani, namun **ada sanksi** bagi yang menolak melaksanakan atau melanggarnya.
- **Zero-Minus Model**
- Efektif untuk kebijakan **strategis, regulatif-protektif dan redistributif**. Misal: anti terorisme, anti narkoba, anti rokok, pajak kekayaan



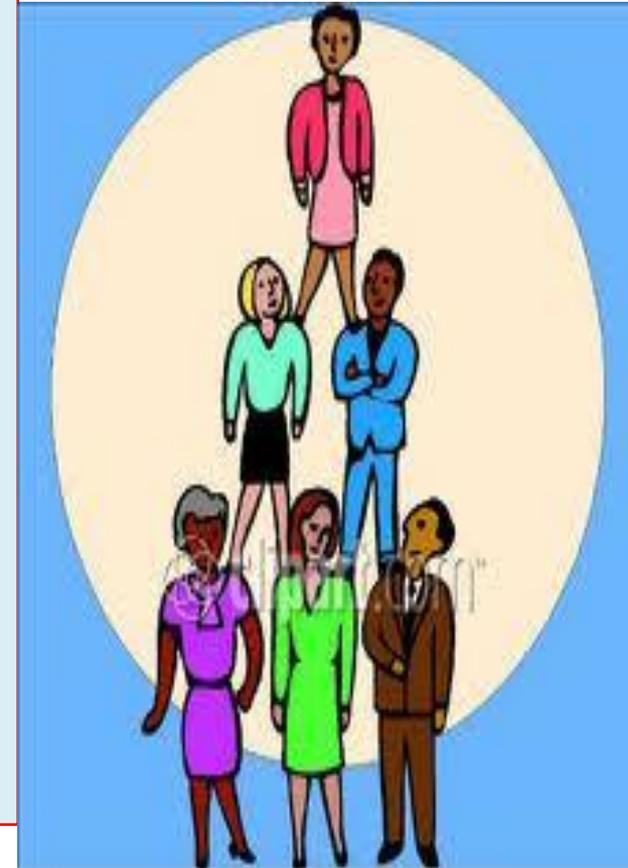
Model Mekanisme Pasar

- **Mekanisme insentif** bagi yang menjalani, dan bagi yang tidak menjalankan **tidak mendapatkan sanksi**, namun tidak mendapat insentif.
- **Zero-Plus model**
- Cocok untuk kebijakan **distributif** : transmigrasi, konversi minyak tanah ke gas, dsb



Top-down approach

- Proses implementasi dari sisi vertikal dan terpusat ; mengikuti **struktur hirarki birokrasi** (Hill, 2009).
- Formulasi kebijakan dibuat oleh lembaga tinggi negara (top level institutions). Implementasi dan evaluasi kebijakan dilaksanakan oleh institusi pelaksana (birokrasi) (Sabatier, 1986).



Top down



- Pola yg dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk **mobilisasi**. Implementasi = **proses delivery mechanism**
- Efektif untuk kebijakan yg sangat **strategis** dan berhubungan dengan keselamatan hidup dan keamanan negara atau kebijakan **regulatif -protektif** : anti terorisme, anti narkoba, UU Lalu Lintas, dsb



The Top-Down Characteristics

Implementation Success : Match between policy objectives and outcomes

Implementation Direction: Vertical-Centralised

Target-Oriented

Hierarchy

Focused on Outputs

Static Objectives

Programmed Strategy

Clear distinction between policy formulation and policy implementation

Top down



- Implementor apabila tidak **memahami isi kebijakan** dapat salah menginterpretasikan tujuan kebijakan shg dapat menyebabkan berbagai problem dalam proses implementasi (Barrett & Hill 1981)

Jeffrey Pressman and Aaron Wildavsky (1984) :

- ...in an implementation process, agencies acts have to match with policy objectives in order to avoid “**implementation deficits**” .

Top down

Basir Chand (www.articlesbase.com) :

- Model top down akan efektif jika **tujuan dan sasaran dirumuskan dgn jelas** dan dipahami dgn baik

Böerzel , 2000 (dlm Maiz-Tome):

- Salah satu faktor yg mempengaruhi implementasi adalah faktor kelembagaan : “**goodness of fit**” = konsistensi antara kebijakan level atas dengan peraturan di bawahnya → **administrative efficiency**



Top down

Faktor-faktor yg mempengaruhi efektivitas implementasi (Sabatier, 1986: 25):

- 1) Tujuan yg jelas dan konsisten
- 2) Adanya hubungan kausal yg andal
- 3) Adanya aturan pelaksanaan sbg pedoman implementasi
- 4) Aparat pelaksana yang berketrampilan dan berkomitmen tinggi.
- 5) Dukungan kelompok sasaran dan stakeholders
- 6) Adanya kondisi sosial ekonomi yg tidak melemahkan dukungan politik.

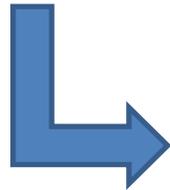


Kelemahan Top Down

- Fokus pada pengambil dan perumus kebijakan , mengabaikan aktor-aktor lain dan cenderung memandang mereka hanya akan menghambat proses implementasi (cocok utk kebijakan strategis-protektif)
- **Realitas sosial sangat kompleks** → kebijakan juga kompleks : mempengaruhi banyak sektor dan melibatkan organisasi, aktor dan level birokrasi dgn tujuan, preferensi, kepentingan dan sumber daya yang berbeda-beda (Berman, 1980).
 - policies represent **compromises between conflicting values** (Hill, 2009).

Kelemahan Top Down

- Tidak mungkin suatu program akan berhasil bila hanya diimplementasikan oleh lembaga pemerintah saja .
- Kompleksitas problem sosial → implementasi harus melibatkan warga negara, asosiasi lokal, kelompok suka rela, organisasi sosial, LSM, dsb

 Bottom-up approach



Bottom-Up

- Model implementasi kebijakan dimana kebijakan **dibuat oleh pemerintah** , namun pelaksanaannya **dilakukan oleh rakyat** (Riant Nugroho,2004)
- Efektif untuk program yang **membutuhkan partisipasi masyarakat** : kebersihan lingkungan, program –program pemberdayaan, program sosial, wajib belajar, dsb



Hibrid

- Memadukan model top down dan bottom up
Kebijakan dibuat pemerintah dan dilakukan oleh **pemerintah bersama rakyat**. Cocok untuk kebijakan yg butuh “**win-win solution**” atau isu **simbolik** : penataan PKL, KB, Pertahanan Rakyat Semesta, dsb
- Asumsi :
 - kebijakan adalah sesuatu yg berkembang, bersifat evolusioner.
 - Implementasi pasti mereformulasi sekaligus menjalankan kebijakan



Hibrid

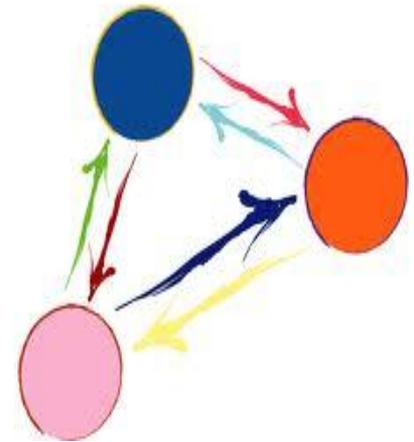
- Implementasi mrpk suatu proses yang **kontinyu** , tidak ada awal atau akhir, implementasi terjadi di semua level kelembagaan publik dan melibatkan aktor politik, birokrasi dan lembaga publik lainnya.



Hibrid

Barret and Fudge (1981) :

- Implementasi paling baik dipahami dalam term “**kontinuum kebijakan – tindakan**” dimana proses interaksi dan negosiasi terjadi sepanjang waktu, antara mereka yg melaksanakan kebijakan dan mereka yang tindakannya tergantung kepada pelaksana itu



A white rectangular sticky note is pinned to a white background with a single red pushpin at the top center. The note is slightly wrinkled and has a soft shadow cast to its left and bottom. The text 'Terima kasih' is written in a black, sans-serif font, centered on the note.

Terima
kasih